

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum positif saat ini, kelemahan- kelemahan kebijakan saksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas saat ini dan merekonstruksi kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila.

Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian yaitu “Teori-Teori Pidana”, meliputi teori absolut, teori relatif, teori gabungan dan teori kontemporer.

Metode pendekatan yang digunakan *yuridis sosiologis* dengan metode kualitatif untuk melihat secara langsung fakta- fakta yang ada di lapangan dalam kaitannya dengan hukum yang hidup di masyarakat berperan menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310, 311 dan 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; (2) Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas saat ini yang mengacu UULAJR yaitu tidak ada pedoman pidana untuk denda yang tidak dibayar baik kesengajaan atau kelalaian, sulit untuk melacak pelaku dalam perkara tabrak lari dan belum ada belum ada kualifikasi yuridis; dalam penegakan hukum banyak menggunakan *Restorative Justice*; ada aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia tidak profesional, bermental buruk; serta partisipasi masyarakat yang tidak tertib; (3) Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila, meliputi kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana dengan merekonstruksi Pasal 310, 311 dan 312 UULAJR dengan mengganti sanksi pidana denda menjadi ganti kerugian dan adanya nilai- nilai Pancasila dengan ide keseimbangan antara pelaku dan korban sebagai wujud kepastian hukum, manfaat dan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada korban.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan Sanksi Pidana, dan Nilai- Nilai Keadilan Pancasila

ABSTRACT

This study aims to uncover and analyze of criminal sanctions criminal traffic accidents based on the current positive law, the weaknesses of the witness's policy of criminal acts of traffic accidents at present and the reconstruction of penal sanction policy traffic accidents act based on values of Pancasila justice.

Some of the theories summarized in the research framework, namely "Criminal Theories", include absolute theory, relative theory, combined theory and contemporary theory.

The approach method used is juridical sociology with qualitative methods to see firsthand the facts that exist in the field in relation to the law that lives in the community plays a role in resolving the crime of traffic accidents.

The results of this study concluded that: (1) The policy of criminal sanctions for traffic accidents is regulated in Article 310, 311 and 312 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation jo National Police Regulation (Perkap) Number 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents; (2) Weaknesses - the weakness of the current policy of criminal sanctions for traffic accidents which refers to UULAJR is that there is no guiding guideline for fines that are not paid either intentionally or negligently it is difficult to trace the perpetrators in hit-and-run cases and there is no juridical qualification yet; in law enforcement many use Restorative Justice; there are law enforcement officers with unprofessional, bad mentality; and disorderly community participation; (3) The construction of a policy of criminal sanctions for traffic accidents based on the values of Pancasila justice, including the policy of criminal sanctions for traffic accidents in the criminal justice system by reconstructing Article 310, 311 and 312 UULAJR with by substituting criminal sanctions for fines for compensation and the existence of Pancasila values the idea of a balance between perpetrators and victims as a form of legal certainty, benefits and justice by providing protection to victims.

Key Words : Reconstruction, Penal Sanction Policy, and Values Pancasila Justice